



PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

2025

BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-NYA, Pemerintah Kota Pariaman dapat menyusun dan menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025 ini adalah untuk memenuhi maksud pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Pariaman sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini berisikan uraian capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta inovasi daerah.

Kesuksesan yang telah tercapai selama rentang waktu tersebut tidak terlepas dari motivasi dan kerja keras dari semua *stakeholder* baik legislatif, eksekutif maupun masyarakat yang terlibat langsung dan berpartisipasi aktif di segala lini demi terselenggaranya tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Diharapkan laporan ini bermanfaat bagi perbaikan kinerja pemerintahan pada tahun berikutnya serta dapat menjadi bahan Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada daerah umumnya dan Kota Pariaman khususnya serta dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan menuju arah yang lebih baik sesuai dengan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Akhirnya, kami menyadari bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami membuka diri untuk menerima masukan dan saran atas isi laporan ini, dan akan menjadi bahan untuk kesempurnaan pembuatan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun berikutnya, terima kasih.

Pariaman, Maret 2026

Wali Kota Pariaman,



Yota Balad



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Daerah	1
C. Kondisi Geografis	1
D. Gambaran Umum Demografis	4
E. Indikator Kinerja Makro	5
BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	7
A. Pendidikan	8
B. Kesehatan	28
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.....	55
E. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	62
F. Sosial	71
BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	73
A. Hasil EPPD	73
B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	73
BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH .	75
A. Penerimaan Daerah	76
B. Pengeluaran Daerah	78
BAB V INOVASI DAERAH	81
BAB VI PENUTUP	109



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH

Kota Pariaman dulunya merupakan Kota Administratif, dan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Oktober 1987.

Dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat, maka status Kota Administratif Pariaman berubah menjadi Kota Pariaman yang secara kelembagaan telah berdiri sejajar dengan daerah kota lainnya di Indonesia.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Pariaman adalah satu dari 19 kab/kota di Sumatera Barat, daerah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman merupakan hamparan dataran rendah dengan luas 64,97 Km², berhawa panas dan memiliki panjang garis pantai 12,7 Km. Disamping daratan terdapat 4 (empat) pulau kecil nonurban yakni Pulau Angso Duo, Pulau Kasiak, Pulau Tengah, dan Pulau Ujuang.

Kota Pariaman terletak antara 00^o 33' 00" - 00^o 40' 43" Lintang Selatan dan 100^o 04' 46" - 100^o 10' 55" Bujur Timur. Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yakni Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Kota Pariaman juga identik dengan Kota Pantai dimana seluruh Kecamatan di Kota Pariaman memiliki wilayah yang berbatasan dengan pantai kecuali Kecamatan Pariaman Timur. Rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 meter dari permukaan laut.

Disamping memiliki pantai yang indah, Kota Pariaman juga dilewati oleh 3 (tiga) sungai yaitu Batang Pariaman sepanjang 12 Km, Batang Manggung sepanjang 11,50 Km dan Batang Manggau sepanjang 11,80 Km.

C. KONDISI GEOGRAFIS

1. Batas Administrasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomo 10 Tahun 2009, kecamatan di Kota Pariaman telah bertambah menjadi 4 (empat) kecamatan yakni : Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Kota Pariaman secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan V Koto Timur (Kab. Padang Pariaman)
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Nan Sabaris (Kab. Padang Pariaman)
- c. Sebelah Timur : Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab. Padang Pariaman)
- d. Sebelah Barat : Samudra Indonesia



Tabel 1.1
Kondisi Topografi Kota Pariaman

Kondisi Topografi	Luas (ha)	Persentase (%)
Datar (0-3%)	6.207	95,53%
Agak Landai (3-8%)	23	0,35%
Landai (8-15%)	48	0,74%
Agak Curam (15-25%)	25	0,39%
Curam (25- 40%)	194	2,99%
Jumlah	6.493	100,0%

Sumber : RTRW Kota Pariaman Tahun 2022-2042

4. Geologi

Seperti pada umumnya daerah lain yang berada di bagian pantai barat pulau Sumatera, Kota Pariaman memiliki jenis batuan resen dan tufa vulkan. Batuan induk penyusun adalah Aluvium serta Tuf Batu Apung dan Andesit (basal). Kota Pariaman secara geologis bersama dengan Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo – Australia dan topografi Padang Pariaman yang dilalui oleh banyak anak-anak sungai. Adapun jenis batuan yang terdapat di Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1) Qal : Endapan Aluvial

Batuan Qal/endapan permukaan merupakan formasi geologi aluvium yang terdiri dari lanau, dan kerikil umumnya terdapat di daratan pantai, termasuk endapan rawa di sebelah utara tikau, sebelah Barat Daya Lubuk Alung dan sebelah Timur Padang.

2) Qpt : TUFT Batu apung dan andesit (basal).

Tuf batuapung umumnya terdiri dari serabut-serabut gelas dari 5 hingga 80% fragmen-fragmen batuapung putih (hampir tidak memiliki mineral-mineral mafik). Berukuran garis tengah 1 hingga 20 cm, agak kompak. Setempat terdapat lapisan-lapisan pasir yang kaya akan kuarsa, juga lapisan-lapisan kerikil yang terdiri dari komponen-komponen kuarsa, batuan gunung api dan batuan gamping. Setempat bongkahan-bongkahan obsidian dan pichstone berwarna kelabu kemerahan sampai kecoklatan baik yang masih segar maupun yang sudah lapuk. Endapan tuft ini mungkin berasal dari erupsi terakhir Kaldera Maninjau atau erupsi celah yang hubungannya dengan jalur sesar besar Sumatera (Westerveld, 1953). Hubungan di lapangan menunjukkan bahwa Qhpt terletak di atas Qpt.

Secara fisik butiran penyusun tanah/batuan yang terdapat di Kota Pariaman yaitu lima satuan: satuan pasir, satuan pasir lempung-lanauan, satuan pasir lempungan, satuan lempungan pasiran dan satuan lanau lempungan. Satuan butiran tanah pasir terdapat di kawasan pesisir. Satuan pasir lempungan terdapat pada dataran sementara satuan lanau lempungan terdapat pada daerah kearah timur. Satuan lempung pasiran terdapat di bagian utara di daerah Tungkal Utara dan Tungkal Selatan.



5. Klimatologi (Iklim)

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34°C, dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.

Musim kemarau dan musim hujan selalu berubah-ubah menurut waktu. Iklim yang demikian memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman, akan tetapi curah hujan dan tingkat kelembaban yang tinggi yang menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya tanaman yang membutuhkan iklim musim kemarau tidak dapat tumbuh dengan baik, merupakan kendala bagi penanganan pasca panen komoditas tertentu yang memerlukan cuaca panas dan cerah selama proses pengeringan, kendala dalam penyimpanan komoditas, berkurangnya jumlah hari kerja produktif dan pengaruhnya negatif terhadap sejumlah komoditas. Iklim juga sangat mempengaruhi besarnya tangkapan ikan bagi nelayan.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2025 sebanyak 104.973 jiwa, mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 dengan jumlah penduduknya sebanyak 103.835 jiwa. Dengan komposisi penduduk untuk tahun 2025 sebanyak 53.128 jiwa penduduk laki-laki dan 51.845 jiwa penduduk perempuan.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Tabel 1.2. Penduduk Kota Pariaman menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	3.974	3.612	7.586
5 – 9	4.571	4.239	8.810
10 – 14	4.925	4.453	9.378
15 – 19	4.656	4.369	9.025
20 – 24	4.747	4.288	9.035
25 – 29	4.640	4.201	8.841
30 – 34	4.031	3.752	7.783
35 – 39	3.737	3.469	7.206
40 – 44	3.826	3.635	7.461
45 – 49	3.433	3.122	6.555
50 – 54	2.823	2.827	5.650
55 – 59	2.411	2.636	5.047
60 – 64	2.019	2.228	4.247
65 – 69	1.488	1.892	3.380
70 – 74	953	1.309	2.262
>=75	894	1.813	2.707
Jumlah	53.128	51.845	104.973

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025



E. INDIKATOR KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman pada tahun 2025 sebesar 81,27 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang besarnya 80,49. Pada level Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, angka IPM Kota Pariaman menduduki urutan ke-lima.

b. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan. Jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman tahun 2025 sebanyak 3.630 orang dengan persentase sebesar 3,83%. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 sebanyak 4.010 dengan persentase 4,26%.

c. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Pada tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,16%, ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,32%.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2025 tercatat sebesar 3,46 persen. Angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari 4.200,08 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 4.345,40 miliar rupiah pada tahun 2025. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2025 tercatat 7.279,06 miliar rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang lalu dimana pada tahun 2024 yaitu sebesar 6.801,89 miliar rupiah.

Struktur perekonomian Kota Pariaman tahun 2025 menunjukkan 3 kategori lapangan usaha yang kontribusinya diatas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah bruto. Secara berurutan masing-masing yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,38 persen, kedua kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,10 persen, dan yang ketiga kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 14,52 persen.

e. PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita merupakan nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Artinya, nilai PDRB perkapita sangat tergantung pada besaran nilai PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang bersangkutan. PDRB Perkapita merupakan pendekatan yang menunjukkan rata-rata pendapatan yang mungkin dinikmati oleh setiap penduduk suatu daerah selama satu tahun. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah maka akan menunjukkan semakin baiknya tingkat perekonomian daerah tersebut, meskipun ukuran ini tidak sepenuhnya dapat menggambarkan pendapatan antar penduduk secara riil dan merata. Penyebabnya keterbatasan PDRB perkapita Atas Dasar



Harga Berlaku ini untuk mendeteksi kondisi riil perekonomian masyarakat disebabkan beberapa hal diantaranya PDRB perkapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi. Selanjutnya, PDRB Perkapita masih mengandung pengaruh tingkat kenaikan harga atau inflasi sehingga belum benar-benar menggambarkan daya beli masyarakat. Namun demikian, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro. Pada tahun 2025 Pendapatan Perkapita Kota Pariaman sebesar 73,26 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 besarnya 69,31persen.

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Gini Ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita). Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika $G < 0,3$ berarti memiliki ketimpangan yang rendah, $0,3 < G < 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika $G > 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 2025 nilai gini rasio Kota Pariaman tercatat 0,302. Ini berarti Gini Ratio Kota Pariaman masih tergolong kategori Ketimpangan Sedang.



BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam pencapaian rencana pembangunan yang berdasarkan kepada misi dan visi yang telah ditetapkan. Program harus dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan roda pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Dalam capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja merupakan keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.



A. PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan diselenggarakan Oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 155.782.847.556,37,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 144.156.623.806,55 (92,54%), dengan uraian berikut:

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase realisasi (%)
	DINAS DIKPORA				157.613.671.556,37	121.935.160.280,55	77,36%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				125.756.905.545,37	92.203.391.775,55	73,32%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.500.000,00	31.424.750,00	91,09%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok	3 dok	100%	24.500.000,00	21.424.750,00	87,45%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				123.421.064.875,37	90.051.580.629,00	72,96%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	123.152.456.875,37	89.807.430.629,00	72,92%
4	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	268.608.000,00	244.150.000,00	90,89%
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah				461.877.500,00	443.765.057,00	96,08%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

5	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 unit	13 unit	100%	179.832.500,00	169.725.500,00	94,38%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	20.000.000,00	19.249.000,00	96,25%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	250.045.000,00	242.790.557,00	97,10%
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				953.253.170,00	820.155.419,00	86,04%
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	94.900.000,00	72.799.419,00	76,71%
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	858.353.170,00	747.356.000,00	87,07%
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				886.210.000,00	856.465.920,55	96,64%
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18 unit	18 unit	100%	142.300.000,00	132.110.400,00	92,84%
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	100%	6.150.000,00	3.450.000,00	56,10%
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1 unit	1 unit	100%	737.760.000,00	720.905.520,55	97,72%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

	Lainnya						
B	Program Pengelolaan Pendidikan				25.449.347.792,00	23.681.978.170,00	93,06%
VI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				15.809.804.860,00	14.814.161.213,00	93,70%
15	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 sekolah	2 sekolah	100%	1.592.630.000,00	1.553.815.332,00	97,56%
16	Pengadaan Mebel Sekolah	3 paket	3 paket	100%	400.000.000,00	395.963.850,00	98,99%
17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1 dok	1 dok	100%	31.174.200,00	27.574.200,00	88,45%
18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	228 orang	228 orang	100%	1.576.794.760,00	1.216.145.900,00	77,13%
19	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81 sekolah	81sekolah	100%	9.963.200.000,00	9.473.536.427,00	95,09%
20	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 dok	1 dok	100%	9.999.400,00	8.699.400,00	87,00%
21	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dok	1 dok	100%	10.000.000,00	-	0,00%
22	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 dok	1 dok	100%	80.199.000,00	37.149.000,00	46,32%
23	Penyediaan Instruktur TIK	1 dok	1 dok	100%	750.000.000,00	743.143.848,00	99,09%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

24	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	1 dok	1 dok	100%	4.422.500,00	-	0,00%
25	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1 dok	1 dok	100%	609.737.000,00	598.617.060,00	98,18%
26	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1 dok	1 dok	100%	10.000.000,00	7.930.000,00	79,30%
27	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	14 sekolah	14 sekolah	100%	758.000.000,00	751.586.196,00	99,15%
28	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1 dok	1 dok	100%	13.648.000,00	-	0,00%
VII	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				3.001.673.682,00	2.698.689.830,00	89,91%
29	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 sekolah	1 sekolah	100%	614.000.000,00	611.501.089,00	99,59%
30	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas	1 dok	1 dok	100%	320.000.000,00	318.442.359,00	99,51%
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 dok	1 dok	100%	200.000.000,00	199.091.074,00	99,55%
32	Pengadaan Mebel Sekolah	1 dok	1 dok	100%	400.000.000,00	191.364.000,00	47,84%
33	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	102 siswa	102 siswa	100%	1.639.150,00	-	0,00%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

34	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1 dok	1 dok	100%	347.046.700,00	346.831.808,00	99,94%
35	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	84 orang	84 orang	100%	546.918.832,00	516.696.500,00	94,47%
36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9 sekolah	9 sekolah	100%	478.100.000,00	473.418.000,00	99,02%
37	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 dok	1 dok	100%	10.000.000,00	7.077.000,00	70,77%
38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dok	1 dok	100%	9.090.000,00	-	0,00%
39	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 dok	1 dok	100%	59.999.000,00	34.268.000,00	57,11%
40	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	1 dok	1 dok	100%	4.880.000,00	-	0,00%
41	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1 dok	1 dok	100%	10.000.000,00	-	0,00%
VIII	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				5.028.990.000,00	4.599.283.818,00	91,46%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

42	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 paket	2 paket	100%	107.563.000,00	64.932.458,00	60,37%
43	Pengadaan Perlengkapan PAUD	6 sekolah	6 sekolah	100%	120.000.000,00	69.696.900,00	58,08%
44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50 orang	0 orang	-	-	-	-
45	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	380 orang	380 orang	100%	2.109.965.000,00	2.029.000.000,00	96,16%
46	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	93 lembaga	93 lembaga	100%	162.800.000,00	126.590.750,00	77,76%
47	Pengelolaan Dana BOP PAUD	93 lembaga	93 lembaga	100%	1.890.600.000,00	1.885.480.860,00	99,73%
48	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	93 lembaga	93 lembaga	100%	77.200.000,00	55.440.000,00	71,81%
49	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 paket	1 paket	100%	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
50	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 paket	1 paket	100%	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
51	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 paket	1 paket	100%	8.942.000,00	-	0,00%
52	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	1 paket	1 paket	100%	190.950.000,00	44.950.750,00	23,54%
53	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	1 paket	1 paket	100%	2.000.000,00	-	0,00%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						
54	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1 paket	1 paket	100%	279.970.000,00	274.669.600,00	98,11%
55	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	650 anak	650 anak	100%	75.000.000,00	44.522.500,00	59,36%
IX	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1.608.879.250,00	1.569.843.309,00	97,57%
56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	93 orang	0 orang	-	-	-	-
57	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	30 orang	30 orang	100%	17.000.000,00	-	0,00%
58	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Non Formal/Kesetaraan	6 lembaga	6 lembaga	100%	50.000.000,00	49.210.000,00	98,42%
59	Pengelolaan Dana BOP Non Formal/Kesetaraan	6 lembaga	6 lembaga	100%	1.295.000.000,00	1.293.124.250,00	99,86%
60	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Non Formal/Kesetaraan	6 lembaga	6 lembaga	100%	16.386.000,00	14.863.750,00	90,71%
61	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dok	1 dok	100%	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
62	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	6 lembaga	6 lembaga	100%	20.991.250,00	10.875.000,00	51,81%
63	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Nonformal dan	1 dok	1 dok	100%	207.502.000,00	199.770.309,00	96,27%



	Kesetaraan						
C	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan				7.850.000,00	5.400.000,00	68,79%
X	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				7.850.000,00	5.400.000,00	68,79%
64	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 lembaga	10 lembaga	100%	7.850.000,00	5.400.000,00	68,79%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN				1.830.824.000,00	1.601.810.937,00	87,49%
D	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				327.951.500,00	179.648.237,00	54,78%
XI	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Labupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				322.587.000,00	179.648.237,00	55,69%
65	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Pembentukan Tim Koordinasi	20 orang	20 orang	100%	171.930.000,00	43.546.000,00	25,33%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

66	Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Serta Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100%	150.657.000,00	136.102.237,00	90,34%
XI	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.364.500,00	-	0,00%
67	Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100%	5.364.500,00	-	0,00%
E	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				1.352.872.500,00	1.272.162.700,00	94,03%
XII	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				293.860.900,00	291.360.900,00	99,15%
68	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100%	110.110.000,00	107.610.000,00	97,73%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

69	Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	1 dok	1 dok	100%	183.750.900,00	183.750.900,00	100,00%
XIII	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan				600.000.000,00	600.000.000,00	100,00%
70	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1 dok	1 dok	100%	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00%
XIV	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				459.011.600,00	380.801.800,00	82,96%
71	Permasalahan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	1 dok	1 dok	100%	459.011.600,00	380.801.800,00	82,96%
F	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan				150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
XV	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
72	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
					-	-	



	SKB DAN SMP				4.568.744.219,00	4.442.579.398,00	97,24%
	SKB				161.671.616,00	147.410.237,00	91,18%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				52.865.216,00	39.410.237,00	74,55%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.260.000,00	7.260.000,00	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	7.260.000,00	7.260.000,00	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				7.755.000,00	5.513.000,00	71,09%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	4.760.000,00	3.193.000,00	67,08%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	2.995.000,00	2.320.000,00	77,46%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.350.216,00	26.637.237,00	75,35%
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	9.600.000,00	7.493.237,00	78,05%
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	25.750.216,00	19.144.000,00	74,35%
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.500.000,00	-	0,00%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	2.500.000,00	-	0,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				108.806.400,00	108.000.000,00	99,26%



V	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				108.806.400,00	108.000.000,00	99,26%
7	Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12 bulan	12 bulan	100%	108.806.400,00	108.000.000,00	99,26%
					-	-	
	SMP Negeri 1 Pariaman				539.188.500,00	551.578.500,00	102,30%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				15.588.500,00	15.288.500,00	98,08%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.960.000,00	9.660.000,00	96,99%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	9.960.000,00	9.660.000,00	96,99%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.168.500,00	4.168.500,00	100,00%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.501.000,00	1.501.000,00	100,00%
4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	847.500,00	847.500,00	100,00%
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.460.000,00	1.460.000,00	100,00%



5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				523.600.000,00	536.290.000,00	102,42%
III	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				523.600.000,00	536.290.000,00	102,42%
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	523.600.000,00	536.290.000,00	102,42%
	SMP Negeri 2 Pariaman				-	-	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				702.147.500,00	738.802.500,00	105,22%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.647.500,00	14.634.500,00	99,91%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.987.500,00	4.974.500,00	99,74%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.452.500,00	2.439.500,00	99,47%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	1.075.000,00	1.075.000,00	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				687.500.000,00	724.168.000,00	105,33%



III	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				687.500.000,00	724.168.000,00	105,33%
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	687.500.000,00	724.168.000,00	105,33%
					-	-	
	SMP Negeri 3 Pariaman				802.821.595,00	765.314.950,00	95,33%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				22.771.595,00	20.580.950,00	90,38%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.900.095,00	16.460.950,00	97,40%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	16.900.095,00	16.460.950,00	97,40%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.871.500,00	4.120.000,00	70,17%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.971.500,00	2.220.000,00	74,71%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	1.000.000,00	-	0,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				780.050.000,00	744.734.000,00	95,47%
III	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				780.050.000,00	744.734.000,00	95,47%
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	780.050.000,00	744.734.000,00	95,47%



					-	-	
	SMP Negeri 4 Pariaman				426.439.000,00	374.722.400,00	87,87%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				15.239.000,00	14.924.000,00	97,93%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.660.000,00	9.660.000,00	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	9.660.000,00	9.660.000,00	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.199.000,00	3.884.000,00	92,50%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.745.000,00	1.745.000,00	100,00%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.704.000,00	1.389.000,00	81,51%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	750.000,00	750.000,00	100,00%
III	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.380.000,00	1.380.000,00	100,00%
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				411.200.000,00	359.798.400,00	87,50%
III	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				411.200.000,00	359.798.400,00	87,50%



6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	411.200.000,00	359.798.400,00	87,50%
					-	-	
	SMP Negeri 5 Pariaman				427.230.150,00	381.030.000,00	89,19%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				13.480.150,00	13.480.000,00	100,00%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.460.000,00	8.460.000,00	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.460.000,00	8.460.000,00	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.020.150,00	5.020.000,00	100,00%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.449.150,00	1.449.000,00	99,99%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.566.000,00	2.566.000,00	100,00%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				413.750.000,00	367.550.000,00	88,83%
III	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				413.750.000,00	367.550.000,00	88,83%
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	413.750.000,00	367.550.000,00	88,83%
					-	-	



	SMP Negeri 6 Pariaman				376.570.658,00	375.384.658,00	99,69%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				19.070.658,00	17.884.658,00	93,78%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.155.000,00	13.915.000,00	98,30%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	14.155.000,00	13.915.000,00	98,30%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.450.659,00	2.504.659,00	72,58%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.450.659,00	1.504.659,00	61,40%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.464.999,00	1.464.999,00	100,00%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.464.999,00	1.464.999,00	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				357.500.000,00	357.500.000,00	100,00%
IV	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				357.500.000,00	357.500.000,00	100,00%
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	357.500.000,00	357.500.000,00	100,00%
					-	-	
	SMP Negeri 7 Pariaman				499.503.000,00	490.735.000,00	98,24%



A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				30.903.000,00	22.135.000,00	71,63%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.240.000,00	9.660.000,00	78,92%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	12.240.000,00	9.660.000,00	78,92%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.663.000,00	-	0,00%
2	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	940.000,00	-	0,00%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.450.000,00	-	0,00%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.523.000,00	-	0,00%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	750.000,00	-	0,00%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.000.000,00	12.475.000,00	95,96%
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	13.000.000,00	12.475.000,00	95,96%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				468.600.000,00	468.600.000,00	100,00%
IV	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				468.600.000,00	468.600.000,00	100,00%
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	468.600.000,00	468.600.000,00	100,00%
					-	-	



	SMP Negeri 8 Pariaman				281.683.000,00	265.313.913,00	94,19%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				35.483.000,00	27.633.913,00	77,88%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.700.000,00	8.460.000,00	97,24%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	8.700.000,00	8.460.000,00	97,24%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.783.000,00	2.783.000,00	100,00%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.033.000,00	2.033.000,00	100,00%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	750.000,00	750.000,00	100,00%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.000.000,00	16.390.913,00	68,30%
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	24.000.000,00	16.390.913,00	68,30%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				246.200.000,00	237.680.000,00	96,54%
IV	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				246.200.000,00	237.680.000,00	96,54%
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	246.200.000,00	237.680.000,00	96,54%
					-	-	
	SMP Negeri 9 Pariaman				351.489.200,00	352.287.240,00	100,23%



A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota				22.589.200,00	22.589.200,00	100,00%
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.215.000,00	16.215.000,00	100,00%
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	16.215.000,00	16.215.000,00	100,00%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.238.000,00	2.238.000,00	100,00%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.488.000,00	1.488.000,00	100,00%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	750.000,00	750.000,00	100,00%
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.636.200,00	2.636.200,00	100,00%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	2.636.200,00	2.636.200,00	100,00%
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
B	Program Pengelolaan Pendidikan				328.900.000,00	329.698.040,00	100,24%
V	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				328.900.000,00	329.698.040,00	100,24%
6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 sekolah	1 sekolah	100%	328.900.000,00	329.698.040,00	100,24%



B. KESEHATAN

Urusan Kesehatan diselenggarakan Oleh Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 114.376.483.204,83 dan realisasi anggaran sebesar Rp 110.221.545.930,00 (96,37%), dengan uraian berikut :

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kebijakan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						Rp 87.736.627.650,00	Rp 85.452.973.293	97,40%
Bidang Kesehatan						Rp 87.736.627.650,00	Rp 85.452.973.293	97,40%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlayannya administrasi perkantoran					Rp 66.646.719.350	Rp 64.956.942.497	97,46%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp 8.160.000	Rp 8.160.000	100,00%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar (Lakip, Profil, LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan) dan realisasi kinerja yang terbit tepat waktu	DPA Dinkes 2025	6 Laporan	6 Laporan	100%	Rp 8.160.000	Rp 8.160.000	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 65.537.298.200	Rp 63.918.213.012	97,53%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Mendapatkan Gaji Dan Tunjangan	DPA DINKES 2025	605 Orang	605 Orang	100%	Rp 65.378.070.200	Rp 63.765.720.012	97,53%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Mendapatkan Gaji Dan Tunjangan	DPA DINKES 2025	12 Dok	12 Dok	100%	Rp 159.228.000	Rp 152.493.000	95,97%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 144.691.500	Rp 144.647.151	99,97%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DPA DINKES 2025	2 Paket	2 Paket	100%	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	DPA DINKES 2025	2 Paket	2 Paket	100%	Rp 7.493.500	Rp 7.493.500	100%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPA DINKES 2025	2 Paket	2 Paket	100%	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	99,96%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan konsultasi SKPD	DPA DINKES 2025	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 126.198.000	Rp 126.153.651	99,96%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp 391.659.650	Rp 391.659.650	85,70%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DPA DINKES 2025	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 180.000.000	Rp 133.011.187	73,90%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPA DINKES 2025	12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 211.659.650	Rp 202.660.433	95,75%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Rp 564.910.000	Rp 550.250.714	97,41%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPA DINKES 2025	25 Unit	25 Unit	100%	Rp 204.800.000	Rp 191.083.867	93,30%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	DPA DINKES 2025	17 Unit	17 Unit	100%	Rp 10.110.000	Rp 10.015.000	93,30%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan	DPA DINKES 2025	1 Unit	1 Unit	100%	Rp 350.000.000	Rp 349.151.847	99,76%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pesentase Meningkatnya Upaya UKP dan UKM					Rp 19.938.065.300	Rp 19.495.574.996	97,78%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota					Rp 5.472.071.300	Rp 5.341.273.808	97,61%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 25 tahun 2023 tentang Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1 Unit	1 Unit	100%	Rp 1.066.982.000	Rp 1.057.545.079	99,12%
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		1 Unit	1 Unit	100%	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	100,00%
Pemeliharaan rutin dan berkala Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	126 Item	126 Item	100%	Rp 199.759.000	Rp 198.031.215	99,14%
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Perpres RI No.12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	187 item	178 item	100%	Rp 4.055.330.300	Rp 3.935.697.514	97,05



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Rp 14.415.504.000	Rp 14.107.561.188	97,86%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		200 Orang	200 Orang	100%	Rp 7.175.000	Rp 7.175.000	100,00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		200 Orang	200 Orang	100%	Rp 7.175.000	Rp 7.175.000	100,00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		200 Orang	200 Orang	100%	Rp 7.175.000	Rp 7.175.000	100,00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		6409 Orang	6409 Orang	100%	Rp 25.172.000	Rp 25.011.313	99,36



Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		58 Orang	58 Orang	100%	Rp21.710.000	Rp 19.760.000	91,02%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		210 Orang	210 Orang	100%	Rp21.000.000	Rp21.000.000	100,00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Orang	100 Orang	100%	Rp 10.000.000	Rp 8.650.000	86,50%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		85 Orang	85 Orang	100%	Rp 19.147.500	Rp 19.147.500	87,84%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		10 Orang	10 Orang	100%	Rp 2.486.000	Rp 486.000	19,55%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Permenkes 67 Tahun 2016 - Perpres 67 Tahun 2021	905 Orang	905 Orang	100%	Rp 43.900.000	Rp 43.900.000	99,52%
			Terbentuknya jejaring eksternal penanggulangan TBC	Klinik swasta, DPM, Organisasi Profesi Kesehatan	100%			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	MDGs Kepmenkes Nomor 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan AIDS dan PIMS	1.188 Orang	1.188 Orang	100%	Rp 48.000.000	Rp 43.862.500	91,38%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dok	1 Dok	100%	Rp 25.000.000	Rp 24.766.000	99,06%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1 Dok	1 Dok	100%	Rp 56.550.000	Rp 48.247.500	85,32%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023 Tentang Penyehatan Lingkungan	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 20.740.000	Rp 18.240.000	87,95%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang germas	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 246.648.000	Rp 243.328.775	98,65%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisiona, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Tradisiona, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya		1 Dok	1 Dok	100%	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000,-	100%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan No 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 138.550.000	Rp 138.550.000	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan		80 Orang	80 Orang	100%	Rp 20.330.000	Rp 20.130.000	99,02%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil pelayanan kesehatan penyakit Menular dan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 363.691.200	Rp 250.365.200	68,84%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

	Tidak Menular	tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan						
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Perpres RI No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan	12 Dok	12 Dok	100%	Rp 12.329.914.300	Rp 12.273.573.300	99,54%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 48.400.000	Rp 16.750.000	34,61%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 68.088.000	Rp 68.088.000	100%
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi		8 Unit	8 Unit	100%	Rp 15.000.000	Rp 12.800.000	85,33%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public safety center (119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan RS dalam satu sistem penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Permenkes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan an Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	100%	Rp 494.781.000	Rp 490.081.100	99,05%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan	DPA 2025	1 Unit	1 Unit	100%	Rp 7.500.000	0	0
Pengelolaan upaya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Permenkes Nomor 6 Tahun 2024	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 285.811.000	Rp 220.277.000	77,07%
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Layanan Imunisasi	Permenkes No.22 Tahun 2022	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 51.560.000	Rp 51.560.000	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi	Jumlah Dokumen Informasi Kesehatan secara Integrasi							
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan sistem Informasi Kesehatan		1 Dok					



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Rp 50.490.000	Rp 46.740.000	95,57%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi, dan ditindaklanjuti perizinannya		4 Unit	4 Unit	100%	Rp 15.490.000	Rp 13.290.000	85,80%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan		7 Unit	7 Unit	100%	Rp 35.000.000	Rp 33.450.000	95,57%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standart					Rp 537.493.000	Rp503.134.850	93,61%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi izin praktek tenaga kesehatan yang dikeluarkan					Rp 15.000.000	Rp 14.300.00	95,33%
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		1 Dok	1 Dok	100%	Rp 10.000.000	Rp 9.300.000	95,33%
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	UU no.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenkes RI Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan SDM					Rp 10.000.000	Rp 9.700.000	97,00%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan BAKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional Kesehatan.• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 10.000.000	Rp 9.700.000	97,00%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Rp 512.493.000	Rp 479.134.850	93,49%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	1. Permen dagri No.13 Tahun 2024 Tentang Posyandu 2. Undan g-undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	605 Orang	605 Orang	100%	Rp 512.493.000	Rp 479.134.850	77,91%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					Rp 429.960.000	Rp 334.982.500	77,91%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Rp 92.140.000	Rp 76.640.000	83,18%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, perizinan Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	100%	Rp 92.140.000	Rp 76.640.000	90,57%
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Permenkes no 14 Tahun 2021		1 Tahun	1 Tahun	0	Rp 15.610.000,-	Rp -	0,00%
Penerbitan sertifikat produksi pangan IRT dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman	Jumlah sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang dikeluarkan					Rp 152.250.000	Rp 111.655.000	73,34



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga									
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan IRT dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah tangga	PerBPOM No.11 tahun 2024 tentang Petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2024	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 152.250.000	Rp 111.655.000	73,34%	
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Rekomendasi sertifikasi laik hiegiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Rp 82.000.000,-	Rp 49.300.000,-	60,12%	



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan		100 depot dan pamsimas	60 depot dan pamsimas	60%	Rp 82.000.000,-	Rp 49.300.000,-	60,12%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						Rp 136.674.000,-	Rp 116.817.000,-	85,47%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan dan minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	PerBPOM No.11 tahun 2024 tentang Petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan menu kegiatan bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2024	75 Produk	75 Produk	100%	Rp 142.020.000	Rp 125.269.000	88,21%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					Rp 184.390.000	Rp 162.338.450	88,04%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/ Kelurahan Menerapkan GERMAS					Rp 20.250.000	Rp 20.238.450	99,94%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat		2 Dok	2 Dok	100%	Rp 20.250.000	Rp 20.238.450	99,94%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga PHBS					Rp 82.480.000,-	Rp 74.520.000,-	90,35%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		4 Dok	0	0			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina					Rp 164.140.000	Rp 142.100.000	86,57%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Permendagri No.13 Tahun 2024 Tentang Posyandu	1 Dok	1 Dok	100%	Rp 164.140.000	Rp 142.100.000	86,57%
			40 Orang Kader Jiwa di dua kecamatan pariaman tengah dan Utara	40 Orang Kader Jiwa di dua kecamatan pariaman tengah dan Utara	100%	Rp 64.834.500,-	Rp 57.384.000,-	88,51%
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Rp 66.000.000,-	Rp 53.650.000,-	81,29%



C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.342.047.783,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 18.649.557.824,00 (91,68%) dengan uraian berikut :

No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		72,60%	70,66%	97,19%	832.236.000	754.959.342	90,71%
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	UU No 17 Tahun 2019	26,89 % %	%	258.725.000	258.067.383	99,70%
2	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu Daerah Kabupaten/Kota	UU No 17 Tahun 2019	72,60%	70,66%	97,19%	573.511.000	496.891.959	86,64%
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		45,00%	57,47%	127,71%	1.705.305.497	1.692.267.896	99,24%
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah	UU No 17 Tahun 2019	45,00%	57,47%	127,71%	1.705.305.497	1.692.267.896	99,24%



No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Program Penyelenggaraan Jalan		74,60%	66,37%	88,97%	4.643.151.500	4.233.799.186	71,61%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan	74,60%	66,37%	88,97%	4.643.151.500	4.233.799.186	71,61%
IV	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		60 orang	-	0,00%	19.641.000	-	0,00%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	UU No.2 Tahun 2012 tentang Jakon	60 orang	-	0,00%	19.641.000	-	0,00%
V	Program Penataan Bangunan Gedung		80,58%	100%	124,10%	996.169.000	929.211.857	93,28%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	80,58%	100,00%	124,10%	996.169.000	929.211.857	93,28%
VI	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		1 Kawasan	1 Kawasan	100%	150.000.000	107.412.000	71,61%%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja PP no.16 tahun 2021	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	150.000.000	107.412.000	71,61%%



No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tentang Bangunan Gedung PP No.15 Tahun 2021 tentang arsitek						
VII	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		98,45%	92,82%	94,28%	223.972.000	221.889.850	99,07%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		98,45%	92,82%	94,28%	223.972.000	221.889.850	99,07%
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		74,03%	24,77%	33,46%	355.785.000	333.461.832	93,73%
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota		74,03%	24,77%	33,46%	355.785.000	333.461.832	93,73%
IX	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		2 dok	1 dok	50,00%	270.055.500	232.475.522	86,08%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kegiatan Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2 dok	1 dok	50,00%	270.055.500	232.475.522	86,08%
X	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		5 Berita Acara	5 Berita Acara	100,00%	58.432.750	28.681.639	49,08%
1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960	5 Berita Acara	5 Berita Acara	100,00%	58.432.750	28.681.639	49,08%



D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.940.142.768,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 11.492.766.404,28 (88,81%), dengan uraian berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penyediaan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana perangkat daerah secara optimal, guna menjamin kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan kinerja pelayanan publik.	100%	100,00 %	100,00	9.657.063.018	8.673.547.881	89,82
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan	100%	100,00 %	100,00	14.455.000	13.120.000	90,76



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah						
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Difokuskan pada terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	100%	100,00 %	100,00	8.968.274.428	8.056.928.658	89,83
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Difokuskan pada terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang tertib, efisien, dan akuntabel guna mendukung optimalisasi kinerja perangkat daerah.	100%	100,00 %	100,00	138.702.500	124.349.301	89,65
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020)	100%	100,00 %	100,00	23.000.000	20.701.500	90



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Difokuskan pada terselenggaranya layanan pendukung operasional perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	100%	100,00 %	100,00	241.751.000	199.616.002	82,57
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Difokuskan pada terjaganya kondisi aset daerah agar tetap berfungsi optimal, tertib administrasi, dan berkelanjutan (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (terkait pengadaan jasa pemeliharaan)	100%	100%	100%	270.880.000	258.837.420	95,55
II	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam	100%	0	0	33.128.000	8.158.250	24,62



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Pengembangan Perumahan	0 Dok	0 Dok	0			
1	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	60%	60	8.512.750	8.158.250	95,83
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan pelayanan perizinan perumahan yang tertib,transparan, akuntabel, dan berbasis kepastian hukum, melalui penerapan standar perizinan yang sesuai dengan rencana tata ruang, ketentuan teknis bangunan, serta peraturan perundang-undangan, guna mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan yang layak, aman, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman).	1,5Ha	0,16Ha	10,67	52.465.750	33.400.190	63,66



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Persentase Perumahan Dan Permukiman Layak Huni (Persentase Perumahan Layak Huni)	94,78%	97,42%	102,78			
1	Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan melalui penanganan kekumuhan secara terpadu, bertahap, dan berkelanjutan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, guna mewujudkan kawasan permukiman yang tertata serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh).	1 Kwsn	1 Kwsn	100%	52.465.750	33.400.190	63,66
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada kawasan perumahan dan permukiman	25%	22,22%	88,88	1.270.000.000	1.265.827.630	99,67



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, guna mendukung terwujudnya lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, dan nyaman, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (terkait PSU lingkungan).						
1	Kegiatan Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	Diarahkan pada penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemenuhan PSU perumahan yang memenuhi standar teknis, layak fungsi, dan berkelanjutan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, guna mendukung terwujudnya kawasan perumahan	9 Lokasi	9 Lokasi	100%	1.270.000.000	1.265.827.630	99,67



NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBIJAKAN	TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		dan permukiman yang layak huni, aman, sehat, dan nyaman, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (terkait PSU lingkungan perumahan).						



E. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.974.388.690,03 dan realisasi anggaran sebesar Rp 19.027.330.042,56 (90,72%), dengan uraian berikut :

N o	Program/Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Satpol PP & Damkar								
I Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota								
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji ASN dan Tunjangannya	1 tahun	100%	Rp 9.598.171.041,-	Rp 8.712.629.732,-	90,77%
1.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Tersedianya honorarium dalam penyediaan jasa adm keuangan	6 OT	100%	Rp 93.840.000,-	Rp 87.476.250,-	93,22%
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		100%	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	100%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								



3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Komsumsi untuk Rapat-Rapat Dinas	200 Orang	100%	Rp 3.941.584,-	Rp 2.935.300,-	74,47%
3.2	Penyediaan barang Cetak dan Pengandaan		Tersedianya Barang Cetak	5 item	100%	Rp 1.477.750,-	Rp 1.477.500,-	99,98%
3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi, ke Instansi Pembina di Pusat, Lintas SKPD yang Tersedia	12 Bulan	100%	Rp 27.577.000,-	Rp 21.515.500,-	78,02%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	100%	Rp 50.506.000	Rp 40.112.173	79,42%
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Honor Tenaga Kebersihan	24 OB	100%	Rp 45.044.366	Rp 37.821.300	83,96%
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5.1	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	7 Unit	100%	Rp 92.400.000	Rp 92.299.000	99,89%
5.2	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipeleihara	15 unit	100%	Rp 65.550.000	Rp 59.985.000	91,51%



	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota								
1.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah		Jumlah Hari Besar yang Diamankan	2 hari besar yang diamankan	100%	Rp 2.183.347.460	Rp 2.154.232.254	98,67%
			Jumlah Lokasi Vital yang Diamankan 8 Lokasi	8 Lokasi Vital yang Diamankan				
			Jumlah Tenaga Kontrak yang Membantu Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Trantibun 120 OB	120 Tenaga Kontrak yang Membantu Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Trantibun sampai bulan juni				
1.2	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan		Jumlah Perda dan Perwako yang Ditegakan 24 Perda	24 Perda dan Perwako yang Ditegakan	100%	Rp 369.452.850	Rp 368.950.250	97,20%



	Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							
1.3	Peningkatan kapasitas SDM Satpolpp dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM		Jumlah Personil yang ditingkatkan kapasitasnya	120 personil	100%	Rp 14.584.750	Rp 5.085.250	34,87%
1.4	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Terjalinya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 1 tahun	Terjalinya Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 1 tahun	100%	Rp 65.198.000	Rp 64.900.000	99,54%
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota								
2.1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota		Terselesaikannya Penegakan Perda /Perwako Secara Non Yustisi 82 Laporan	Terselesaikannya 82 laporan Penegakan Perda /Perwako	100%	Rp 23.322.000	Rp 23.278.000	99,81%
2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota		Terselesaikannya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota 82 kasus	Terselesaikannya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota 82	0.00%	Rp 18.375.000	-	0.00%



				kasus				
3. Pembinaan PPNS Kab/Kota								
3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Meningkatnya kapasitas karier PPNS	Meningkatnya karier PPNS	100%	Rp 3.833.000	Rp 3.532.500	92,16%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran								
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terciptanya masyarakat yang sadar bahaya kebakaran serta tersedianya biaya jasa serta Jaminan tenaga kerja dan kesehatan bagi tenaga kontrak bantuan pemadam kebakaran 1 tahun	Terciptanya masyarakat yang sadar bahaya kebakaran serta tersedianya biaya jasa serta Jaminan tenaga kerja dan kesehatan bagi tenaga kontrak bantuan pemadam kebakaran 6 bulan	100%	Rp 1.168.800.440	Rp 1.601.843.233	137,05%
1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah cakupan warga negara yang memperoleh layanan penanggulangan kebakaran 100%	Jumlah cakupan warga negara yang memperoleh layanan penanggulangan kebakaran 100%	100%	Rp 788.700.940	Rp 824.152.595	104,49%
1.3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%	Jumlah cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%	100%	Rp 7.786.500	Rp 18.652.000	239,54%



Badan Penanggulangan Bencana Daerah						Rp 5.823.425.008,-	Rp 4.900.098.255,-	84,14%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2024						
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 laporan	7 laporan	100%	Rp 1.864.580,-	Rp 1.864.580,-	100%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		64 Orang	64 Orang	100%	Rp 4.023.066.156	Rp 3.309.222.195,-	82,26%
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Rp 71.555.000,-	Rp63.045.000,-	88,11%
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8 Paket	8 Paket	100%	Rp 2.736.000,-	Rp 2.200.000,-	100%
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		26 Paket	26 Paket	100%	Rp 5.525.164,-	Rp 5.454.000,-	98,71%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6 Paket	6 Paket	100%	Rp 8.424.000,-	Rp 6.200.000,-	73,60%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 39.948.000,-	Rp 39.191.716,-	98,11%
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 unit	1 unit	100%	Rp 5.500.000,-	Rp 5.495.610,-	99,92%
9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor		12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 84.000.000,-	Rp 81.004.780,-	96,43%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 88.908.738,-	Rp 83.492.330,-	93,91%
11	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		6 Unit	6 Unit	90%	Rp 76.000.000,-	Rp 65.183.590,-	85,77%
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10 Unit	9 Unit	90%	Rp 6.570.000,-	Rp 5.510.000,-	83,87%
13	Penyusunan Kajian Risiko Bencana		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Rp 156.940.500,-	Rp 152.870.500	97,41%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

	Kabupaten/Kota							
14	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (per jenis bencana)		4000 orang	4000 orang	100%	Rp 12.420.50,-	Rp 8.767.700,-	70,59%
15	Penyediaan Peralatan dan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		66 Unit	66 Unit	100%	Rp 45.950.000,-	Rp 43.780.800,-	94,19%
16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		1 Kawasan	1 Kawasan	100%	Rp 62.600.000,-	Rp 59.244.000,-	94,64%
17	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		2 Dokumen	0 Dokumen	10%	Rp 14.372.300,-	Rp 1.159.500,-	8,07%
18	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		250 orang	225 orang	100%	Rp 977.644.000,-	Rp 879.636.420,-	88,16%



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

19	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		6.700 orang	6.652 orang	100%	Rp 6.250.000,-	Rp 6.243.750,-	99,90%
20	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		12 Laporan	12 Laporan	100%	Rp 81.270.500,-	Rp 79.302.134,-	97,58%
21	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		1 Dokumen	0 Dokumen	0%	Rp 51.879.650,-	Rp 1.179.650,-	2,27%



F. SOSIAL

Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.420.898.905,00- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.669.976.657,00 (29,55%), dengan uraian berikut :

No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 tahun	1 tahun	100	3.023.612.881,-	2.723.189.447,-	90
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
1	Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	85 % (PPKS) 8 (Lembaga)	85 % (PPKS) 8 (Lembaga)	100	155.039.750,-	128.567.550,-	82,93
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng di Luar Panti	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100	8.923.459.880,-	643.402.800,-	7,21
2	Rehabilitasi Sosial dasar PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti social	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100	40.000.000,-	22.216.950,-	55,54
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pariaman Tahun 2025

No	Program/kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase realisasi (%)
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100	125.287.600,-	40.760.000,-	32,53
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	100	71.396.000,-	36.119.610,-	50,59
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2 kpg/2 lumbung	2 kpg/2 lumbung	100	46.407.250,-	21.000.000,-	45,25
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
1	Pemeliharaan TMP Nasional Kabupaten/Kota	Perda No. 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	87 makam dan 12 laporan	87 makam dan 12 laporan	100	35.695.544,-	35.340.300,-	99,57



BAB III

HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. HASIL EPPD

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kota Pariaman mendapatkan skor **2,1408** dengan status “Rendah”.

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Pariaman bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan professional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material



dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Pariaman. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pariaman serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Pariaman tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.a atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman yang menjelaskan bahwa per 31 Desember 2024 saldo Kas yang tersedia adalah sebesar Rp 1.571.594.340,16. Saldo kas tersebut tidak cukup untuk melunasi Utang Belanja dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.192.971.396,01. Pemerintah Kota Pariaman juga telah menggunakan dana yang telah ditentukan penggunaannya untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp 10.995.011.738,84. Hal tersebut terjadi karena penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mempertimbangkan perkiraan yang terukur secara rasional dan manajemen kas yang tidak tertib. Pemerintah Kota Pariaman perlu melakukan manajemen keuangan daerah secara memadai agar dapat mengurangi dan membiayai seluruh tagihan atau utang belanja. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.



BAB IV

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Penerimaan Pemerintah Daerah adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu yang menyangkut seluruh penerimaan yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya.

Penerimaan pemerintah akan memberikan pandangan yang sangat membantu tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang berbeda yang mampu mengontrol pertumbuhan anggaran pemerintah dan konsekuensinya menghalangi tingkat defisit keuangan daerah. Penerimaan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah, selain jumlah penduduk juga mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah.

Selain penerimaan, seperti lazimnya sebuah organisasi, pemerintah melakukan banyak pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi untuk membiayai kegiatan perekonomian, seperti menggerakkan dan merancang kegiatan ekonomi yang masyarakatnya atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya.

Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Berdasarkan kinerja dalam struktur anggaran daerah pengeluaran daerah dibagi menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pemerintah yang konsumtif sebab pengeluaran ini manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan daerah, sedangkan pengeluaran



pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif karena pengeluaran ini digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang dapat menambah kekayaan daerah.

A. PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp655.738.471.097,00 dengan realisasi sebesar Rp620.430.914.948,89 atau mencapai 94,62% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp644.362.029.673,36, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp23.931.114.724,47) atau 3,71%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan TA 2025 dan 2024 adalah:

Tabel 4.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%	2024
	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	655.738.471.09700	620.430.914.948,89	94,62	644.362.029.673,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.713.656.675,00	57.449.978.227,89	86,11	38.861.600.702,04
Pendapatan Pajak Daerah	24.153.192.141,00	22.296.272.876,00	92,31	14.396.111.950,00
Pendapatan Retribusi Daerah	12.987.038.800,00	11.729.158.547,00	90,31	9.376.715.070,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.365.010.955,00	11.365.010.955,00	100,00	11.331.512.753,00
Lain-lain PAD yang sah	18.208.414.779,00	12.059.535.849,89	66,23	10.807.038.869,36
PENDAPATAN TRANSFER	585.024.814.422,00	558.980.936.721,00	95,55	598.450.651.031,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	493.638.229.358,00	482.035.816.658,00	97,65	523.642.264.998,00
Dana Bagi Hasil Pajak	8.463.920.358,00	6.892.265.406,00	81,43	6.320.110.669,00



Uraian	2025		%	2024
	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.256.212.000,00	3.267.262.000,00	100,34	5.977.692.000,00
Dana Alokasi Umum	412.300.209.000,00	407.108.094.546,00	98,74	417.506.738.000,00
Dana Alokasi Khusus	69.617.888.000,00	64.768.194.706,00	93,03	93.837.724.329,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	47.990.832.000,00	47.908.954.400,00	99,83	41.844.428.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	6.963.163.000,00	6.963.163.000,00	100,00	0,00
Dana Desa	41.027.669.000,00	40.945.791.400,00	99,80	41.844.428.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	43.167.753.064,00	28.391.165.663,00	65,77	32.963.958.033,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	43.165.753.064,00	28.391.165.663,00	65,77	32.963.958.033,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	640.000.000,00
Bantuan Keuangan	230.000.000,00	645.000.000,00	280,43	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	230.000.000,00	645.000.000,00	280,43	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.644.532.711,54 dan terealisasi sebesar Rp2.644.532.711,54 atau sebesar 100,00% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 seluruhnya bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2024), sesuai ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rincian Penerimaan Pembiayaan berdasarkan sumber kas sebagaimana disajikan sebagai berikut:



Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	1.571.594.340,16
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	86.760.250,00
3	Kas di BLUD	479.674.452,38
4	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	28.000.000,00
5	Kas Dana BOS	10.126.000,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	468.377.669,00
Jumlah		2.644.532.711,54

B. PENGELUARAN DAERAH

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

TA 2025 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Hibah
 - d. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Transfer Bagi hasil Pendapatan
 - b. Transfer Bantuan Keuangan



Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp655.447.003.808,00 dengan realisasi sebesar Rp598.455.933.818,44 atau 91,31% dari anggaran. Dengan demikian terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp56.991.069.989,56 atau 8,69% yang tidak terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp648.100.984.541,33, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp49.645.050.722,89) atau 7,66%. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 serta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

4.2 Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Belanja Daerah	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	526.370.469.695,89	485.891.824.192,10	92,31	501.308.593.783,33
2	Belanja Modal	34.814.704.203,00	24.540.291.383,34	70,49	58.680.468.559,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.230.000.000,00	561.152.287,00	10,73	120.495.000,00
4	Belanja Transfer	89.031.829.909,11	87.462.665.956,00	98,24	87.991.427.199,00
Jumlah		655.447.003.808,00	598.455.933.818,44	91,31	648.100.984.541,33

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.936.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.936.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 seluruhnya merupakan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT Bank Nagari) Cabang Pariaman. Penyaluran PMP dilakukan berdasarkan SP2D Nomor 13.77 /04.0 /000001 /Pembiayaan /5.02.0.00.0.00.01.0000/M/10/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Penyaluran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT. Bank Nagari Cabang Pariaman Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 serta persetujuan Walikota Pariaman.

Dalam hal ini, Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel. 4.3 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran TA 2024

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Pendapatan	620.430.914.948,89	
2.	Belanja		598.455.933.818,44
3.	Penerimaan Pembiayaan	2.644.532.711,54	
4.	Pengeluaran Pembiayaan		2.936.000.000,00
	Jumlah	623.075.447.660,43	601.391.933.818,44

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kota Pariaman pada akhir Tahun Anggaran 2025 (per 31 Desember 2025) terealisasi sebesar Rp21.683.513.841,99. SiLPA TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp19.038.981.130,45 atau 719,94% dibandingkan SiLPA TA 2024 sebesar Rp2.644.532.711,54. Kenaikan yang signifikan ini terutama disebabkan oleh realisasi pendapatan yang melampaui target dan/atau realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran pada TA 2025.



BAB V

INOVASI DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 386 ayat (2) menyatakan bahwa Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 388 ayat (7), (9), (10) dan (11) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri dan Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa Inovasi daerah berbentuk :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.



Tabel 5.1 Inovasi Daerah Tahun 2025

No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ESDM Versi 4 (Elektronik Sumber Daya Manusia Versi 4)	Penerapan	Program Kepegawaian Daerah	
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota (BPBD Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GERCEP PAKU KACA (Gerakan Cepat Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana)	Penerapan	Penanggulangan Program Bencana	
3.	Bagian Organisasi Kota Pariaman (Bag. Organisasi Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik		PENPELIK (Pendampingan Pelayanan Publik)	Penerapan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
4.	BAPPEDA Kota Pariaman	Inovasi tata kelela pemerintahan daerah	Non Digital	(DANA ALOKASI KHUSUS DAK KOLABORATIF KOLABORATIF)	Penerapan	dan Sinkronisasi Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	SALAM IKD (Sapa layani Masyarakat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital)	Penerapan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	IKD DI MPP (Dukcapil DUKCAPIL MENYALA Melayani Aktivasi langsung Identitas Kependudukan Digital di Mall Pelayanan Publik)	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	MENYALA IKD DI RUANGAN DINSOS (Melayani Aktivasi Langsung Identitas kependudukan Digital di Ruangans Dinas Sosial)	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	DUKCAPIL MENYAPA DISABILITAS (Dukcapil Melayani Administrasi Kependudukan Disabilitas)	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	DUKCAPIL MENYAPA LANSIA (Dukcapil Melayani Administrasi Kependudukan bagi Lanjut Usia)	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	DUKCAPIL MENYAPA ODGJ (Dukcapil Melayani Administrasi Kependudukan Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa)	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	DUKCAPIL MENYAPA ORANG SAKIT (Dukcapil Melayani Administrasi Kependudukan bagi Orang	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
				dalam keadaan Sakit)			
12.	UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Pamanis Non Buatan (Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik dan Balita Gizi Kurang	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
13.	UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	KULABRAK (Kunjungan Rumah Lansia Beresiko)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
14.	UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	KOPPASUS (Kelompok Olahraga Petugas Puskesmas menggunakan Aplikasi Sipgar untuk Meningkatkan	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
		kewenangan Daerah		Kesehatan)			
15.	UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Si Bucek Buming (Siapkan Ibu Hamil Dengan Buku Monitoring)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
16.	UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PAKDULTUMBANG (Pendidikan Anak Usia Dini Dan Kader Peduli Tumbuh Kembang)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
17.	UPT Puskesmas Kampung Baru Padusunan - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PSC PADUSUNAN (PEMBERI LAYANAN KHUSUS SIPENYANDANG DISABILITAS CERIA)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
18.	UPT Puskesmas Sikapak - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ERA SIKUMBANG BATU (EDUKASI ORANG TUA BERBASIS INFORMASI	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
				KOHORT TUMBUH KEMBANG BAYI DAN BALITA DIGITAL DARI ANALISIS SISTEM PUSKESMAS SIKAPAK)		KESEHATAN MASYARAKAT	
19.	UPT Puskesmas Sikapak - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	SIPUKEK MIA (SISTEM PEMANTAUAN IBU HAMIL KEK DAN ANEMIA) PUSKESMAS SIKAPAK KOTA PARIAMAN	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
20.	UPT Puskesmas Sikapak - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	SOLUSI (SKRINING ONLINE UNTUK SEHAT DAN PRODUKTIF) PUSKESMAS SIKAPAK	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
21.	UPT Puskesmas Sikapak - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	BUK POPPI (BUKU POP UP EDUKASI KESEHATAN GIGI)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
				PUSKESMAS SIKAPAK KOTA PARIAMAN		KESEHATAN MASYARAKAT	
22.	UPT Puskesmas Sikapak - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GAJEBO SUSHI TB (GERAKAN JEMPUT BOLA SUSPEK INFEKSI TUBERKULOSIS)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
23.	UPT Puskesmas Air Santok - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	SIKEMBAR (SKRINING KESEHATAN MANDIRI DENGAN BARCODE)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
24.	UPT Puskesmas Air Santok - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	SIKEPIN (SKRINING KESEHATAN ILP KETUK PINTU)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
25.	UPT Puskesmas Air Santok - Dinas Kesehatan Kota	Inovasi pelayanan	Non Digital	JASTEGAR (JALAN SEHAT TINGKATKAN	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
	Pariaman	publik		KEBUGARAN)		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
26.	UPT Puskesmas Air Santok - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SILIK MANTIK VERSI 2 (SILIK PEMANTAU JENTIK VERSI 2)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
27.	UPT Puskesmas Air Santok - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	YANTI BERSATU VERSI 2 (PELAYANAN TUBERCULOSIS SATU PINTU TERPADU VERSI 2)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
28.	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	JAHE CINTA KLOP (KESEHATAN, LEZAT, OPTIMAL DAN	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
				PEDULI)		KESEHATAN MASYARAKAT	
29.	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PING SI DOORA (Sweeping Imunisasi Door To Door Terintegrasi)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
30.	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	SIKUDA (Sistem Informasi Keliling Kampung dengan Ambulance)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
31.	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	JARI SETIA (Remaja Putri Sehat Tanpa Anemia)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
32.	UPT Puskesmas Marunggi - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	RAHASIA BERLIN (Rencana Saat Hamil Siap Ber-KB Pasca	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
				Salin)		KESEHATAN MASYARAKAT	
33.	UPT Puskesmas Pariaman - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	POKESPAR (POJOK OLAHRAGA PUSKESMAS PARIAMAN)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
34.	UPT Puskesmas Pariaman - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	R-CHAT (RUANG CURHAT)	Penerapan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
35.	UPT RSUD dr. Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PEDEKATE (Pengarsipan data Melalui pencatatan Berbasis Web Google Spreadsheets)	Penerapan	RBA RSUD Dr.SADIKIN	
36.	UPT RSUD dr. Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	MODAL SEHAT (Media Penyampaian Informasi Kesehatan) sosial Dalam	Penerapan	RBA RSUD Dr.SADIKIN	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
37.	UPT RSUD dr. Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PACU KUDA (Peduli Kecelakaan Untuk Aksi Cepat Urgensi Dijamin)	Penerapan	RBA RSUD Dr.SADIKIN	
38.	UPT RSUD dr. Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	OBAT MAGER (Optimalisasi pengendalian Obat Melalui pencatatan Berbasis Web Google drive)	Penerapan	RBA RSUD Dr.SADIKIN	
39.	UPT RSUD dr. Sadikin - Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	KOMPAK ADEM (edukasi cara Kompres Hangat Ketika Anak Demam)	Penerapan	RBA RSUD Dr.SADIKIN	
40.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	E Kliping Plus (Elektronik Kliping Plus)	Penerapan	PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	
41.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	PPID On The Spot (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi On The Spot)	Penerapan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
42.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Podcast IKP Round Kominfo Pariaman (Podcast Informasi Komunikasi Publik Round Round)	Penerapan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
43.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	SIAP SPBE (Sistem Informasi Aduan Pelayanan SPBE)	Penerapan	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
44.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SAJAM SANTAI (SATU JAM SAPU PANTAI) DI DESA WISATA	Penerapan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
45.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan	Non Digital	LAHAN (layanan konsultasi Hukum Tanah)	Penerapan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
		Daerah					
46.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP Kota Pariaman)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SIBARAM (Sistem Informasi Bangunan air Pariaman)	Penerapan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
47.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	RAKEBUM (RABU KETEMU BUMDES)	Penerapan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
48.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	RUSA VERSI II (RUANG DESA VERSI II)	Penerapan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
		kewenangan Daerah					
49.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	LKAAM GO TO SCHOOL (LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU GO TO SCHOOL)	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
50.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD Kota Pariaman)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	MAWAS KERJA (BERSAMA MENGAWASI KINERJA)	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
51.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB Kota Pariaman)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	BERLIAN CERIA	Penerapan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
52.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	PILOK (Pariaman Informasi Lowongan Pekerjaan)	Penerapan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
53.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	KOPI 2.0 (Kartu Informasi Potensi Investasi 2.0)	Penerapan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
54.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SENYAWA HARMONI (Sinergi Nyata Wujudkan Hubungan Industrial Aman , Rukun dan Harmonis)	Penerapan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
55.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SI CANTIK MANIS (Strategi Capaian Investasi Kota Pariaman yang Informatif dan Solutif)	Penerapan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
56.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Digital	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DIGITAL	Penerapan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
57.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu	Inovasi tata kelola	Digital	SEMUT PERIZINAN (SISTEM EVALUASI MUTU	Penerapan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
	Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker Kota Pariaman)	pemerintahan daerah		SATU PINTU PERIZINAN)			
58.	Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Bus Angkutan Kawan Sekolah Aman (BUS ANGKASA)	Penerapan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
59.	Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Sistem Informasi Gangguan Lalu Lintas Terintegrasi - SI GITA	Penerapan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
60.	Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Sistem Giliran Antrian & Pengingat PKB (SIGAP-PKB)	Penerapan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
61.	Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Statistik Kapal Dan Penumpang Pulau (POSKAPA)	Penerapan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
62.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM dan UKM (Disperindagkop Kota	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Pendaftaran Sertifikasi dan Pendampingan Perizinan Usaha Industri (Sukseskan	Penerapan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
	Pariaman)			Sunset Pasir Sunur)			
63.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM dan UKM (Disperindagkop Kota Pariaman)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Sertifikasi dan Gerakan Masyarakat Sadar Halal (Pendampingan Pekan Gemar Halal)	Penerapan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
64.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM dan UKM (Disperindagkop Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	BABAKO RAMI (Bangun Bersama Koperasi Untuk Berantas Kemiskinan)	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
65.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM dan UKM (Disperindagkop Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	SOBAT UMKM (Solusi Bantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
66.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM dan UKM (Disperindagkop Kota Pariaman)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SIKOPAR Plus (Sistem Informasi Komoditi Pasar Plus)	Penerapan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
67.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip Kota Pariaman)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	BIJAK (Bina Literasi Jadikan Anak Cerdas)	Penerapan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
68.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	DIKSI (Digitalisasi Pelaporan Data Produksi)	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
69.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Inovasi tata kelola pemerintahan	Digital	DADAKAN (Digitalisasi Pelaporan Dokumen Akuntabilitas Kinerja)	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
		daerah					
70.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Inovasi tata kella pemerintahan daerah	Digital	SIPERAS (Sistem Pelayanan Rekomendasi Surat BBM Nelayan)	Penerapan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
71.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	EPATERNA (Edukasi Pembuatan Pakan Ternak Unggas Alternatif)	Penerapan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
72.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	Vet Health Card	Penerapan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
73.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Yankeswan Raun	Penerapan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
74.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	KLINIS (Klinik Agribisnis)	Penerapan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
75.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	SISI ASIK MEDSOS (Konsultasi dan Promosi Hasil Produksi Ikan melalui Media Sosial UPTD BBI)	Penerapan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
76.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Inovasi pelayanan publik	Digital	Sidara (Sistem Informasi Surat Menyurat)	Penerapan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
77.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Lapor Pol PP	Penerapan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
78.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Inovasi pelayanan publik	Digital Non	Jatibumdes (Jaga Ketertiban Umum Desa)	Penerapan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
79.	Dinas Sosial Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	BANGRUM (BANGUN RUMAH UNTUK MASYARAKAT MISKIN)	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
80.	Inspektorat Kota Pariaman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	KUPAS DURIAN VERSI III	Penerapan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
81.	Inspektorat Kota Pariaman	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	REHAT (Reviu Hemat Tanpa Kertas)	Penerapan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
82.	Inspektorat Kota Pariaman	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	RANDAI (Regulasi dan Aturan Digital Inspektorat)	Penerapan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
83.	Inspektorat Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	Si- BUDI (Silahkan Isi Buku Tamu Digital)	Penerapan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
84.	Inspektorat Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	DASI TUAN. (Digitalisasi Tindak Lanjut Temuan)	Penerapan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
85.	Kantor Kesbangpol Kota Pariaman	Inovasi pelayanan publik	Digital	SI ORMAS	Penerapan	PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK MELALUI PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN BUDAYA	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
						POLITIK	
86.	Sekretariat DPRD Kota Pariaman	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Sistem Informasi Pembahasan KUA/PPAS dan RAPBD "Si KUAD" di Sekretariat DPRD Kota Pariaman	Penerapan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
87.	Kecamatan Pariaman Selatan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	SARU SABUN (Satu Rumah Satu Kebun)	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
88.	Kecamatan Pariaman Selatan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	SUKETI (Sulam Kepala Peniti)	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
89.	Kecamatan Pariaman Selatan	Inovasi tata kelola pemerintahan	Non Digital	JIMPI (Jahelo Inovasi Masyarakat Peduli Industri)	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
		daerah					
90.	Kecamatan Pariaman Selatan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	BUDIMAG (Budidaya Maggot)	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
91.	Kecamatan Pariaman Timur	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Derma Yatim (Desa Berinfak dan Peduli Anak Yatim)	Penerapan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
92.	Kecamatan Pariaman Timur	Inovasi pelayanan publik	Digital	TANGGA PARTIM (DATA TUNGGAL PARIAMAN TIMUR)	Penerapan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
93.	Kecamatan Pariaman Utara	Inovasi pelayanan publik	Digital	Wartawan Desa	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



No (1)	Pelaksana Perangkat Daerah (2)	Bentuk Produk Inovasi (3)	Jenis Produk Inovasi (4)	Inovasi Nama Produk (5)	Status Inovasi Produk (6)	Kegiatan Program dan atau (7)	Ket. (8)
94.	Kecamatan Pariaman Utara	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kujare Manjah (Kunyit, Jahe, Serai-dan Jasmani Sehat)	Penerapan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) berisikan antara lain : capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD, Opini atas Laporan Keuangan Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah serta Inovasi Daerah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan berbagai urusan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan penerapan Otonomi Daerah. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja makro dimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman mengalami sedikit peningkatan sebesar 81,27 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 80,49. Angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 3,83 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,26 persen. Angka pengangguran mengalami penurunan dari 5,32 persen menjadi 5,16 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman mengalami percepatan dengan tumbuh sebesar 3,46 persen. Sementara Pendapatan per kapita Kota Pariaman meningkat mencapai 73,26 persen. Akan tetapi, ketimpangan pendapatan Kota Pariaman tergolong ketimpangan sedang dengan nilai tercatat 0,302.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan upaya dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berlandaskan kepada visi Kota Pariaman yaitu “Terwujudnya *Pariaman Kota Wisata yang Maju, Mandiri, Kreatif, Berbasis Agama dan Berbudaya*” yang dijabarkan ke dalam misi Pembangunan Daerah. Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman diperlukan sebagai jembatan yang menghubungkan antara Visi dan Misi dengan strategi yang ditetapkan. Strategi Pemerintahan Kota Pariaman merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan maupun sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Program tersebut merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman untuk mencapai sasaran dan



tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kota Pariaman mendapatkan skor **2,1408** dengan status "Rendah". Sedangkan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman terhadap Laporan Keuangan Kota Pariaman Tahun 2024 dengan penyajian "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Dalam menentukan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan di Kota Pariaman, perlu ditinjau sumber-sumber penerimaan daerah yang menjadi kriteria penting dalam mengalokasikan belanja, menentukan strategi dan prioritas anggaran. Pada Tahun 2025 target dari pendapatan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp655.738.471.097,00 dengan realisasi sebesar Rp620.430.914.948,89 atau sebesar 94,62%. Untuk belanja daerah pada APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. Rp655.447.003.808,00 dan direalisasikan sebesar Rp598.455.933.818,44 atau 91,31%. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Pariaman memiliki 94 inovasi daerah pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dan diharapkan informasi ini dapat menjadi masukan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.